

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI JUMAT
25 AGT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



BUMRT MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN

MUDA
DINAMIS
AMANAH



ARIE
WIBOWO

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



Anggota DPRD Samarinda Anhar

Maraknya Kawasan Pertanian Beralih Fungsi, Pemkot Samarinda Diminta Manfaatkan Lahan Eks Tambang

SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Anhar, mengkhawatirkan terjadinya pengalih fungsian kawasan pertanian di Samarinda sebagai Kota Penyanggal Ibu Kota Negara. Peralihan fungsi tersebut, bisa terjadi di mana kawasan pertanian berubah menjadi kawasan perumahan dan industri. Anhar menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memanfaatkan kawasan eks tambang.

"Pertanian kita ini akan tergerus. Jadi Pemkot Samarinda mungkin ke depannya bisa memikirkan hal ini," katanya pada Kamis (24/8/2023).

Dikatakan, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memang sudah disahkan pada Februari 2023 lalu. Akan tetapi, lanjut Anhar, kawasan pertanian kondisinya di bawah 10 hektare dari luasan Kota Samarinda 71 ribuan hektare. "Jadi dari luasan Kota Samarinda yang sekitar 71 ribuan hektare itu, kawasan terluas digunakan untuk perumahan atau permukiman, industrial dan jasa," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk fokus terhadap kemungkinan pengalihan lahan yang mungkin akan terjadi kapan saja. Bahkan, dia juga menyarankan untuk memanfaatkan kawasan eks tam-

bang untuk menjadi kawasan pertanian.

"Anggaran APBD untuk tim teknis pertanian kecil, seharusnya wilayah ini bisa diberikan porsi besar agar pemerintah bisa benar-benar memanfaatkan kawasan eks tambang itu menjadi kawasan pertanian," tukasnya.

Menurutnya banyak kawasan eks tambang yang bisa dimanfaatkan, dari pada hanya dibiarkan rusak. Apalagi banyak kolam eks tambang yang menelan korban jiwa.

Namun begitu, dirinya juga menyadari bahwa lahan-lahan eks tambang tersebut biasanya sangat sulit untuk dijadikan pertanian.

"Karena teori mengatakan lahan bekas tambang itu sangat sulit untuk dikembangkan ke pertanian, karena unsur tanah atau topsoilnya sudah banyak yang hilang. Oleh sebab itu pemerintah harus benar-benar analisis yang tajam dan sediakan anggarannya," harapnya.

Perlu diketahui luas total Kota Samarinda adalah 71.678,36 hektare. Untuk saat ini dalam RTRW kawasan pertanian seperti Kawasan Tanaman Pangan hanya ditetapkan seluas 1.012,36 hektare. **(han)**

MKP MEDIA KALTIM PROMOSINDO



RAMAIKAN
& IKUTI
EVENT
NYA
YUK

ACARA PUNCAK
HUT KE-3 MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

DAFTAR PAKAI
KUPON
DIGITAL
GRATIS

IKUTI JUGA
SENAM SEHAT
BERSAMA
(XEROBIC QUEEN76)

JALAN SEHAT



LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA
MULAI PUKUL 06.00 WITA

Daftarkan diri gratis melalui link:

<https://registration.myevents.id/contests/1/registration>



Paket **MAKSIMAL** Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2

Rp **90rb** nett
/pax

Paket Ber3

Rp **130rb** nett
/pax



Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE

1 pax comp.
Light Meal





Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan peserta pejabat Pemkot Samarinda. (Diskominfo Samarinda)

HINDARI KORUPSI, KPK INGATKAN PEJABAT PEMKOT SAMARINDA HIDUP SEDERHANA

SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan kepada para pejabat Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk mengutamakan kehidupan keluarga sederhana sehingga dalam mengemban amanah jabatannya mudah terhindar dari praktik korupsi.

"Keluarga akan terkena masalah kalau ada pasangan atau keluarga terkena kasus korupsi. Semua akan menjadi sorotan masyarakat," kata Kepala Satgas III Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, di Samarinda, Rabu (23/8/2023).

Saat menjadi narasumber pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Keluarga Berintegritas yang diikuti oleh Pejabat Pemkot Samarinda, David mengungkapkan KPK sangat prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang turut menyeret anggota keluarga sebagai pelakunya. Terhitung hingga Bulan Desember 2022, KPK telah menangani 1.515 pelaku korupsi, di antara kasus tersebut, adanya keterlibatan keluarga.

"Dalam bimtek, kami berikan materi diantaranya pencegahan korupsi di sektor keluarga, Buka Mata Buka Hati atau refleksi antar pasangan, dan family building dimana mereka menggali kekompakan dan keseriusan," ungkap David.

Kota Samarinda menjadi kota pertama di Kaltim yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kel-

uarga Berintegritas, Bimtek ini merupakan inisiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Wali Kota Samarinda Andi Harun didampingi istri Rinda Wahyuni Andi Harun beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengikuti Bimtek tersebut.

Walikota Andi Harun mengakui bahwa bimtek ini sangat bermanfaat, mengingat ada dua kondisi yang rawan korupsi jika menyangkut hubungan keluarga dan penyelenggara negara.

Dua kondisi tersebut ialah pasangan dari pejabat dipastikan ikut serta dalam pelaksanaan tugas, khususnya di bidang promosi. Kedua, fenomena gaya hidup yang tidak sebanding dengan kemampuan pasangannya.

"Kebiasaan yang berulang kali gaya hidup yang mewah, menyebabkan keinginan yang banyak. Kebutuhan akan uang semakin besar. Jadi tidak dapat dipenuhi dengan cara yang baik," papar Andi.

Andi menilai, peran keluarga juga sangat penting untuk membangun nilai anti korupsi. Jika di lingkungan keluarga telah tertanam nilai anti korupsi, maka pejabat pun mampu menekan diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi tersebut

"Melalui peran keluarga para penyelenggara di Pemkot Samarinda semakin berintegritas untuk mencegah dan memberantas korupsi," jelas Andi Harun. **(Ant/MK)**



Walikota Samarinda Andi Harun memukul gong sebagai tanda peluncuran Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) di Kota Samarinda. (Diskominfo Samarinda)

PEMKOT SAMARINDA BENTUK BUMRT GUNA MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN

SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur membentuk Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi lokal.

Walikota Samarinda Andi Harun menjelaskan badan usaha berbasis tingkat kelurahan tersebut telah terbentuk sebanyak 82 unit usaha yang tersebar di 59 kelurahan dan 10 kecamatan se kota Samarinda.

"BUMRT berbasis di Kelurahan dengan memberikan peran kepada RT sebagai struktur utama di masyarakat. Jika di RT tersebut ekonominya bagus, lingkungan bagus, usaha bagus, otomatis kelurahan jadi ikut bagus," ucap Andi Harun di Samarinda, Rabu (23/8/2023).

Andi Harun menyebutkan, BUMRT adalah sebuah harapan Samarinda untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi lokal di lingkungan RT berbasis tingkat kelurahan, yang telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Walikota Nomor 72 tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program BUMRT Berbasis Kelurahan.

"Dengan BUMRT ini akan membuka peluang wira usaha baru yang mendukung program penciptaan 10.000 wira usaha baru, dan penyerapan tenaga kerja sehingga menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan,"

kata Andi Harun.

Menurutnya program ini akan menyasar usia produktif yang nantinya akan bermuara pada program BUMRT yang masih bersesuaian dengan Pro Bebaya, program unggulan Pemerintah Kota Samarinda.

"BUMRT ini dibentuk setiap kelurahan. Tidak menutup kemungkinan, dalam satu kelurahan akan ada lebih dari satu BUMRT berbasis kelurahan. Harapannya bisa memberikan dampak berlanjut di lingkungan masing-masing," jelasnya.

Kelurahan menjadi ujung tombak, karena Andi Harun menilai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan dimulai dari lingkungan kelurahan, dengan mengidentifikasi potensi-potensi perekonomian yang bisa dikembangkan secara kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam program BUMRT tersebut, katanya Pemkot Samarinda memberikan berbagai dukungan melalui pembentukan dan penguatan wirausaha.

Penguatan usaha tersebut diantaranya Kredit Usaha Rakyat bertuah, yaitu pinjaman kepada pelaku usaha dengan bunga 0 %, dimana Pemkot melalui Dinas koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda telah menggelirkan dana Rp15 miliar.

Kemudian, kegiatan Dana Insentif Daerah (DID) dengan memberikan voucher gratis sebesar Rp100 ribu selama 3 bulan kepada 5.250 pelaku usaha.

Selanjutnya Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah pusat melalui APBD provinsi dan disalurkan kepada pelaku usaha yang tersebar di 59 kelurahan sebanyak 10.000 pelaku usaha, dengan nilai sebesar Rp 600 ribu / pelaku UKM.

"Melalui Perangkat Daerah terkait juga telah memberikan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi digitalisasi usaha untuk pelaku usaha di Kota Samarinda," kata Andi Harun.

Ia tidak memungkiri, sejauh ini beberapa faktor penyebab kurang berkembangnya badan usaha di tingkat kelurahan/desa adalah keterbatasan pada akses modal, kemampuan SDM, keterampilan, dan keterbatasan pemasaran produk atau jasa.

Oleh karena itu katanya perlu adanya dukungan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini BUMD/Perusda Kota Samarinda sebagai pihak yang diharapkan dapat berkolaborasi dengan BUMRT, agar dapat lebih maksimal dalam pengelolaannya. Ia mengatakan, dalam rangka meningkatkan efektivitas integrasi dan kolaborasi ini Pemerintah Kota berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan BUMRT. "Termasuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan akses informasi dan pelatihan serta memfasilitasi pertemuan antar BUMRT untuk saling tukar pengalaman," jelas Andi Harun. **(Ant/MK)**



Samri Shaputra

TOK! DUA RAPERDA DISAHKAN DPRD SAMARINDA

SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II di Lantai II Ruang Rapat Paripurna pada Rabu (23/8/2023) malam. Dalam sidang tersebut, DPRD Samarinda menyetujui penetapan dua Raperda menjadi Perda. Yakni, Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

Dalam isi kesepakatan, menyoroti beberapa isu penting. Di antaranya, soal bantuan hukum, perlindungan anak, penanggulangan kebakaran, pendidikan aman bencana, pajak retribusi daerah, regulasi terkait minuman keras (miras), penataan tempat hiburan malam (THM), penginapan atau

guest house dan perhotelan.

"Penetapan Raperda ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Samarinda," kata Andi Harun. Ditambahkan Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Samri Shaputra yang menyebut bahwa Rapat Paripurna kali ini membuat Perda baru. "Jadi ini Perda baru, karena perda sebelumnya dasar hukumnya sudah tidak digunakan lagi," ujarnya.

Diketahui, Sidang Paripurna DPRD Samarinda diikuti oleh 31 orang anggota DPRD atau tidak diikuti semua anggota dewan (45 orang). Akan tetapi rapat tetap dinyatakan kuorum karena dihadiri lebih dari separuh jumlah keseluruhan anggota. **(han)**



KEBAKARAN DI LOA JANAN HANGUSKAN 6 BANGUNAN, PULUHAN KK KEHILANGAN TEMPAT TINGGAL

**DUKUNG PENDIDIKAN KUKAR,
PHM SERAHKAN
PULUHAN PAKET BEASISWA**





General Manager PHM, Setyo Sapto Edi (tengah), saat menyerahkan secara simbolis kepada mahasiswa Kukar, didampingi Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Istimewa)

DUKUNG PENDIDIKAN KUKAR, PHM SERAHKAN PULUHAN PAKET BEASISWA

TENGGARONG – Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus dilakukan di Kutai Kartanegara (Kukar). Baik melalui program Beasiswa Kukar Idaman, juga melalui Pengembangan Program Masyarakat (PPM) atau kerap disebut CSR di bidang pendidikan. Kali ini datang dari PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Bantuan diberikan secara simbolis kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, dari General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, pada Kamis (17/8/2023) lalu. Ini bukan menjadi yang pertama dilakukan, sehingga sangat berdampak secara berkelanjutan bagi masyarakat.

"PHM menjalankan berbagai program PPM di bidang pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sejalan dengan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 4 yakni pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata," ujar Setyo Sapto.

Sebanyak 84 mahasiswa yang menempuh pendidikan di 17 Perguruan Tinggi (PT) disemua jenjang. Mulai dari jenjang D3,

D4, Strata 1, Strata 1 Guru Linier, dan Strata 2 di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dirincikan, 25 orang dari Kecamatan Anggana, 6 orang dari Kecamatan Muara Badak, 25 orang dari Kecamatan Muara Jawa, 23 orang dari Kecamatan Samboja, dan 5 orang dari Kecamatan Sanga-Sanga. Ini termasuk beasiswa untuk mahasiswa dari Pesisir sebanyak 3 orang mahasiswa dari Kecamatan Anggana.

Tak sebatas pemberian beasiswa, Pendampingan Sarjana Pesisir berupa bimbingan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan fasilitasi pendaftaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ini diperuntukkan bagi siswa dan siswi di kecamatan pesisir. Dengan total 28 siswa yang berhasil masuk PTN dan mendapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tahun 2023.

Ditambahkan Manager Communication Relations dan CID PHI-Regional 3, Dony Indrawan, menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas SDM merupakan salah satu fokus program CSR unggulan Perusahaan.

Dony berharap program yang dijalankan melalui kerja sama dengan Pertamina Foundation ini, dapat mengantarkan generasi muda dari wilayah operasi perusahaan. Untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan menjadi penggerak kemajuan di daerahnya masing-masing.

"Kami saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan program Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan bagi pelajar dengan prestasi akademik yang baik namun berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan di tingkat sarjana di perguruan tinggi di Kalimantan," jelas Dony.

Sementara itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyambut baik Program Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Sarjana Pesisir dari PHM. Menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas SDM di Kukar. Tentunya menjadi semangat dan pelecut bagi pelajar dan mahasiswa dalam menuntut ilmu. "Ini menjadi dukungan nyata dunia usaha untuk Kukar," tutupnya. **(afi)**



Kondisi bangunan yang hangus terbakar di Desa Loa Janan Ulu (Istimewa).

KEBAKARAN DI LOA JANAN HANGUSKAN 6 BANGUNAN, PULUHAN KK KEHILANGAN TEMPAT TINGGAL

TENGGARONG - Musibah kebakaran melanda RT 2 Dusun Manunggal 2, Desa Loa Janan Ulu, Kutai Kartanegara (Kukar). Kejadian ini berlangsung, Kamis, 24 Agustus 2023, sekitar pukul 03.45 WITA. Akibatnya, enam bangunan ludes terbakar, meninggalkan puing-puing arang.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Mediakaltim.com, 22 jiwa dari lima Kepala Keluarga (KK) yang menempati lima rumah tunggal dan satu bangsal dua pintu kini kehilangan tempat tinggalnya.

Kapolsek Loa Janan, AKP Andy Wahyudi, menjelaskan bahwa warga pertama kali melihat api

berasal dari rumah salah satu warga bernama Mislán. Awalnya, terdengar suara pecahan kaca saat warga sedang terlelap tidur. Warga segera berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menghubungi relawan dan petugas pemadam kebakaran (damkar).

"Dugaan sementara penyebabnya adalah konsleting listrik, namun ini masih didalami," ungkap Andy pada Kamis (24/8/2023).

Tantangan pemadaman api semakin besar karena lokasi yang padat penduduk dan mayoritas rumah berbahan dasar kayu, sehingga api mudah membesar.

"Memang, dalam situasi sep-

erti ini, terutama pada musim kemarau, sumber air menjadi kendala utama. Posisi kebakaran juga cukup sulit dijangkau," kata Kepala Disdamkar dan Penyelamatan Kukar, Fida Hurasani.

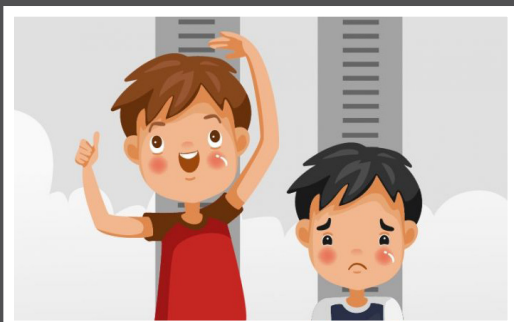
Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa atau luka. Sebanyak tujuh unit truk milik Disdamkar dan Penyelamatan serta PMK Swasta, ditambah 15 mesin portable milik relawan, dikerahkan untuk proses pemadaman yang berlangsung selama 1,5 jam.

Upaya ini didukung oleh relawan dari Kota Samarinda, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, serta pihak kepolisian. (afi)

WACANA JALAN TEMBUS SEPANJANG PESISIR LOKTUAN



BACA HALAMAN A2



Legislatif Ngeluh Ada Lurah Cuek Masalah Stunting

BACA HALAMAN A4



Wacana Jalan Tembus Sepanjang Pesisir Loktuan

BONTANG – Wacana jalan tembus di wilayah Kelurahan Loktuan pernah dilon-tarkan Wali Kota Bontang, Basri Rase. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal pasca mengikuti Penge-sahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Faisal, beberapa wak-tu yang lalu wali kota pernah mewa-

canakan ide membuat jalan tembus dari Masjid Terapung menuju Kantor Kelurahan Loktuan. Rutenya menyusuri sepanjang wilayah pesisir Loktuan dimulai dari Kampung Selambai.

Ide tersebut menurut wali kota bisa menjadi salahsatu solusi untuk kasus-kasus emergency yang terjadi di Loktuan. Apabila sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran dan semacamnya, ataupun kondisi jalanan macet, warga

bisa menggunakan jalan tembus terse-but sebagai akses keluar.

Ide itu dibutuhkan lantaran wilayah Loktuan dikelilingi oleh lautan, sehingga dibutuhkan akses alternatif bagi warga Loktuan sebagai langkah pengamanan apabila terjadi sesuatu.

"Walaupun baru sebatas wacana, saya mendukung ide tersebut. Semoga saja ke depan dapat benar-benar terwujud," ujar Faisal. (adv/al)





Visi Selambai Jadi Kampung Wisata Didukung Pemerintah Daerah dan Pusat

BONTANG – Visi Kampung Selambai, di Kelurahan Loktuan menjadi kampung wisata ke depannya terus mendapat dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal pasca Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan anggota dewan yang berdomisili di Selambai ini, bahwa dukungan nyata sudah ditunjukkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Untuk pemerintah pusat terbukti dengan kehadiran Anggota Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. Bahkan dikatakan Faisal, bantuan pembangunan jalan cor tersebut sudah sampai tahap review DED. Diharapkan bulan 8 ini tahapan tersebut sudah selesai. Pasca Review DED di bulan 9 dan 10 memasuki proses lelang.

"Ini bukti keseriusan pemerintah pusat bantu Bontang, khususnya Selambai. Semoga sebelum Juni Tahun 2024 pembangunan jalan cor itu sudah kelar. Sebelum masa jabatan presiden berakhir," bebernya.

Bantuan dari pusat ini akan diwu-

judkan di sepanjang pesisir Kampung Selambai. Mulai dari RT 03 ke RT 02, dan ke RT 01. Dimana rute ini memang rute yang sudah direncanakan sebagai akses wisata ke depannya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah pun ikut mendukung pembenahan kampung di ujung Loktuan ini. perbaikan-perbaikan jembatan kayu ulin terus dilakukan, lalu penataan bak sampah, hingga APAR.

"Kami terus kawal pembenahan di Kampung Selambai. Semoga ke depannya kampung wisata benar-benar terwujud di Selambai," pungkasnya. (adv/al)



Legislatif Ngeluh Ada Lurah Cuek Masalah Stunting

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyesalkan masih adanya beberapa lurah yang acuh tak acuh terhadap permasalahan stunting. Hal itu ditunjukkan dengan tak adanya respon saat anggota dewan menanyakan progres perkembangannya.

Hal itu diungkapkan Raking saat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, bahwa pihaknya selaku bidang terkait masalah stunting ini kerap saat ingin berkoordinasi dengan beberapa kelurahan, namun lurahnya acuh tak acuh. Pihaknya hanya ingin mengetahui bagaimana perkembangan masalah stunting tersebut. Apakah ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi.

“Ditelpun pun kadang sulit. Mohon disampaikan ke lurah-lurah ini, kami ini DPRD bukan sekedar menanyakan, tetapi sama-sama cari solusi. Bagaimana program stunting di daerah masing-masing khususnya di Bontang Selatan bisa turun secepatnya. Sesuai program pemerintah pusat,” keluhnya kepada Wali Kota Bontang.

Wali Kota Bontang pun menanggapi masalah tersebut dengan berencana mengadakan rapat besar. Tidak hanya unsur forkopimda, namun juga dengan DPRD dan perusahaan. Untuk menyikapi masalah stunting dan masalah-masalah kemiskinan lainnya.

“Selama ini kan kita hanya bahas antar forkopimda saja, itupun unsur pimpinannya saja. Nanti kita bikin rapat besar. Kita minta masukan dari semua yang hadir,” ujarnya. (adv/al)



Apel Pagi Dispopar, Kadispopar Ingatkan Pegawai Harus Bekerja Maksimal

BONTANG - Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang, Ahmad Aznem memimpin langsung apel rutin seluruh pegawai Dispopar Bontang. Apel rutin ini digelar di Aula Gedung Graha Pemuda, Senin (21/8/2023).

Dalam amanatnya, Kadispopar memberikan arahan agar setiap bidang yang ada di Dispopar memaksimalkan kegiatan hingga akhir tahun. Ia juga meminta agar semua pegawai baik PNS ataupun TKD bekerja secara maksimal.

"Setiap pegawai baik PNS atau TKD harus siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujarnya mengutip dari akun Instagram Dispopar Bontang.

Pasca apel pagi selesai, Tenaga Kontrak Daerah (TKD) mendapat arahan lebih lanjut dari Sekretaris Dispopar Bontang, Rita Atin Widiarti. Ia menyampaikan dengan adanya perpanjangan kontrak, TKD Dispopar diharapkan bisa bekerja dengan baik.

Atin juga mengingatkan agar tidak ada yang saling menjatuhkan antar bidang. Semua harus bergerak bersama dan saling berkoordinasi.

"Saya harap semua TKD bisa disiplin akan waktu. Upayakan meminimalisir keterlambatan," ungkap Atin.

Selain TKD, para ASN di lingkungan Dispopar Bontang juga turut mendapat arahan dari Kadispopar Ahmad Aznem. Aznem menyampaikan PNS harus bisa menjadi teladan bagi para pekerja honorer. Ia juga mengingatkan agar ASN bisa lebih peka untuk memajukan instansi/organisasi.

Bagaimanapun sebagai pegawai negara maupun daerah, yang fasilitasnya ditanggung oleh negara, maka ASN



LALU FOR RADAR BONTANG

Suasana apel pagi Dispopar Bontang dipimpin Kadispopar Ahmad Aznem.

diberikan kewajiban untuk bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap negara, daerah, ataupun di instansi tempatnya bekerja.

"Saya berharap kesadaran diri untuk

bekerja secara prima lebih ditingkatkan lagi. Terutama menjaga kekompakan satu sama lain juga menjadi hal yang sangat perlu dijaga," pungkas Aznem. (adv/al)



Gadis Di Bawah Umur Disetubuhi Pacar, Orangtua Lapor Polisi

BONTANG – Seorang pria di Jalan Poros Bontang melakukan tindak asusila terhadap gadis di bawah umur yang tak lain kekasihnya sendiri. Polsek Marangkayu berhasil meringkus pelaku.

Pria 20 tahun berinisial Sa dilaporkan oleh orangtua korban. Pelaku kemudian ditangkap di Gunung Menangis, Marangkayu, Kukar pada Selasa (28/8/2023) pukul 15.00 Wita.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kapolsek Marangkayu Iptu Fahrudi, mengatakan bahwa mereka melakukan perbuatan layaknya suami istri sebanyak dua kali, di tempat yang berbeda. Yakni pada September 2022, dan April 2023.

“Masih kami alami, apakah benar baru dua kali, atau lebih, apakah ada TKP lain lagi atau tidak,” katanya dikutip dari situs Polresbontang.com.

Diketahui korban masih berumur 14 tahun. Kini korban telah dalam pendampingan P2TP2A.

Tersangka pun dijerat pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Editor: Yusva Alam



SYAKURAH/RADARBONTANG

Wali Kota Bontang meninjau calon lokasi baru SDN 007 BU.

Relokasi SDN 007 BU, Pemkot Siapkan 1.5 Hektar Lahan

BONTANG – Pasca tinjauan lapangan ke SDN 007 Bontang Utara (BU) di Kelurahan Guntung, Rabu (23/8/2023) kemarin, Wali Kota Bontang, Basri Rase pun beralih meninjau lahan yang rencananya dijadikan tempat relokasi SDN 007 Guntung itu.

Rencananya, pemkot akan merelokasi SD tersebut, agar bisa menjadi sekolah dengan sarana prasarana (sarpras) yang memadai.

Wali Kota Bontang, Basri Rase yang menyetujui hal tersebut, langsung berencana membangun sekolah tersebut di tanah milik pemkot yang berada di belakang Rusunawa, Kelurahan Guntung dengan luas 1.5 hektar.

"Tanah di RT 15 yang kami gunakan memang milik pemerintah, sehingga perizinan tentu sudah jelas," ucap Basri

Di tahun 2023 ini, Basri memerintahkan Disdikbud Bontang untuk memulai pengerjaan dengan

melakukan pemantapan lokasi dan membuat master plan melalui anggaran perubahan tahun ini.

Setelah itu, lokasi yang ditentukan akan dilakukan penimbunan karena lahan tersebut masih berupa rawa.

"Akhir tahun ini akan kita mulai lakukan penimbunan terlebih dahulu, tahun depan akan dilihat DED serta amdalnya," jelasnya.

Setelah DED dan amdal selesai, pembangunan akan dimulai pada tahun 2025. Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran sekira Rp 50 miliar lebih.

Untuk bangunan lama SDN 007 BU nantinya bisa dialih fungsikan untuk beberapa hal seperti kantor, TK, PAUD dan sebagainya.

"Bangunan ini bisa dialih fungsikan, bisa saja juga jadi kantor-kantor untuk mitra dari kelurahan atau bahkan puskesmas," imbuhnya.

Pewarta: Syakurah

Editor: Yusva Alam



JADI KENDALA, PEMOHON HIBAH RUMAH IBADAH HARUS SELESAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TEPAT WAKTU



BUAYA DI LABUAN CERMIN, PEMKAB MASIH CARI SKEMA



Bupati Berau Sri Juniarsih saat memberikan hibah rumah ibadah secara simbolis kepada Masjid Nurul Yaqin di Kecamatan Gunung Tabur.

JADI KENDALA, PEMOHON HIBAH RUMAH IBADAH HARUS SELESAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TEPAT WAKTU

TANJUNG REDEB - Kabag Kesjahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Berau, Mulyadi mengimbau kepada seluruh pemohon hibah rumah ibadah di Kabupaten Berau untuk tepat waktu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban mereka. Sebab, dana hibah sangat berisiko apalagi pihaknya juga diperiksa aparat.

"Apa yang sudah mereka terima harus dipertanggungjawabkan. Kalau bisa sebelum 10 Januari di tahun berikutnya. Yang penting masuk dulu laporan mereka," katanya, Kamis (24/8/2023).

Pihaknya juga selalu mengingatkan kepada pemohon agar tepat waktu untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Memang diakuinya sementara belum ada aturan baku untuk mendisiplinkan mereka.

"Kami masih menggodog

aturan, apakah kalau telat ada pinalti tidak bisa mengusulkan permohonan selama 2 hingga 3 tahun," sambungnya.

Selain keterlambatan laporan tersebut, dibebarkannya tidak ada kendala lain. Adapun tahun ini sebanyak 17 rumah ibadah di Kabupaten Berau mendapat dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Masing-masing nilainya berbeda, terbesar mencapai Rp 500 juta. Dengan total anggaran Rp 3,9 miliar.

Dijelaskannya, perbedaan besaran tersebut berdasarkan usulan yang diajukan masing-masing rumah ibadah. Tidak hanya masjid saja tapi juga gereja. Namun, tahun ini tidak ada hibah untuk pura.

"Kirsan paling banyak Rp 500 juta berdasarkan permohonan dan setelah memverifikasi sesuai

alamat pemohon. Kami kemudian merekomendasikan ke TAPD untuk dirapatkan siapa yang berhak mendapat hibah," jelasnya.

Jika setelah diverifikasi ada persyaratan yang belum lengkap, pastinya akan ditolak dan tidak direkomendasikan kepada TAPD. Persetujuan tersebut juga tergantung kemampuan anggaran daerah.

"Usulan pemohon di mana pun akan kami proses. Tapi banyak juga pemohon dari kampung yang jauh belum paham bagaimana caranya permohonan hibah melalui bagian Kesra," terangnya.

Yang pasti ke depan pihaknya akan selalu memonitor dan mengevaluasi. Karena rata-rata pemohon juga keterbatasan SDM untuk mengurus administrasi. **(mnz/dez)**



Bupati Berau Sri Juniarsih.

PEMKAB MASIH CARI SKEMA, SOAL PENAMPAKAN BUAYA DI LABUAN CERMIN

TANJUNG REDEB - Kemunculan buaya di objek wisata Labuan Cermin Kecamatan Bidukbiduk masih saja meresahkan. Sayangnya, Pemkab Berau hingga saat ini masih belum menemukan solusi yang tepat.

Sepertinya Labuan Cermin akan benar-benar dijadikan objek wisata konservasi sejak kemunculan buaya di sana.

Bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan, pihaknya masih mendiskusikan soal kemunculan buaya di sana. Muncul opsi untuk dilakukan penangkaran, maupun pemindahan buaya ke tempat yang jauh dari aktivitas masyarakat. Yang mana akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah kecamatan.

"Sebenarnya siap saja memindahkan buaya itu. Yang jelas, Pemkab Berau tidak akan ting-

gal diam. Dan akan mencari solusi maupun skema yang tepat, agar Labuan Cermin dapat kembali dibuka dengan aman," terangnya, Kamis (24/8/2023).

Dia juga menegaskan, agar siapapun yang datang ke Labuan Cermin itu untuk tidak berenang atau menceburkan diri ke dalam air. Sebab kata dia, riak air dapat mengundang buaya mendekat, dan itu bisa membahayakan keselamatan pengunjung.

"Jangan ada yang berenang di sana. Karena masih berbahaya," jelasnya.

Namun, Sri juga belum bisa memastikan soal pemindahan buaya yang ada di sana. Sebab, sebelumnya juga sudah ada wacana tersebut. Tapi, tidak sedikit warga yang menentangnya. Lanjutan kepercayaan atau mitos masyarakat Bidukbiduk.

"Karena masih ada masyarakat yang masih percaya (mitos) bahwa, buaya adalah keluarga dan segalam macamnya. Jadi, kita lihat nanti bagaimana hasil koordinasi di lapangan. Nanti akan disosialisasikan ke masyarakat," jelasnya.

Ke depan pihaknya tentu akan melakukan koordinasi dengan BKSDA Kaltim, guna menemukan solusi dan skema terbaik untuk objek wisata unggulan Labuan Cermin.

Menurutnya, jika objek wisata itu ingin dibuka, haruslah dalam pengawasan ketat. Dan menjadikan objek wisata itu sebagai wisata konservasi, dengan menikmati pemandangan alam di sana.

"Tidak masalah untuk tetap dibuka, tapi jangan ada pengunjung yang berenang lagi," tegasnya. **(mnz/dez)**



KEBAKARAN DI SEPINGGAN RENGGUT NYAWA REMAJA & HANGUSKAN 4 RUMAH



**TERORIS "LEDAKKAN BOM" DI BANDARA
SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN**



Simulasi latihan PKD berskala besar yang menunjukkan bom meledak di Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan, pada Kamis (24/8).

Teroris “Ledakkan Bom” di Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan

BALIKPAPAN - Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang Balikpapan pada Kamis (24/8/2023) mendadak ramai. Sekelompok massa berkumpul di terminal kedatangan untuk menolak seorang tokoh publik yang dianggap tak laik untuk masuk di wilayah Kalimantan Timur.

Aksi ini bahkan sempat mendapat pengamanan ketat dari kepolisian hingga berujung aksi saling dorong. Namun secara tiba-tiba, salah satu dari massa tersebut meledakkan bom bunuh diri di loby Terminal Kedatangan Bandara SAMS Sepinggang.

Suasana yang menegangkan tersebut ternyata hanya sebagian aksi dari serangkaian Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) Ke-III skala besar yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan.

General Manager AP I Bandara

SAMS Sepinggang, Ahmad Syaugi Shahab mengatakan, pelaksanaan PKD ini merupakan wujud komitmen AP I dalam mewujudkan layanan bandara yang mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang terbaik untuk pengguna jasa.

"Latihan ini memastikan fungsi koordinasi antar instansi dalam menangani peristiwa yang terjadi di salah satu obyek vital negara yaitu bandara dan kesiapan menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujarnya.

Ahmad Syaugi Shahab menjelaskan, melalui simulasi keadaan darurat ini personel dan fasilitas menjadi lebih tanggap dan sigap ketika terjadi kondisi emergency di bandara sesuai dokumen program keamanan Bandara.

"AP I akan melakukan evaluasi untuk mengetahui apa saja yang harus diperbaiki baik dari internal maupun eksternal," jelasnya.

Pada Latihan Penanggulangan

Keadaan Darurat (PKD) Ke-III skala besar ini dimulai dengan apel pembukaan dilanjutkan latihan penanganan kecelakaan pesawat di sisi barat runway, penanganan demo dan teroris yang membawa bom di area loby kedatangan serta terakhir kebakaran di restoran lantai 3 bandara.

"Di samping penanganan pada saat kejadian, juga ada latihan penanganan pasca kejadian yang meliputi penanganan keluarga korban serta simulasi media handling," tutupnya.

Dalam Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat kali ini melibatkan sedikitnya 650 personil gabungan dari PT Angkasa Pura I, TNI Angkatan Udara Dhomber, Otoritas Bandara Wilayah VII, Basarnas Kota Balikpapan, Brimob Polda Kaltim, Polres Balikpapan, Polsek Kawasan Bandara, Koramil 0905/03 Balikpapan, Perum LP-PNPI Cabang Balikpapan, dan Rumah sakit setempat. **(bom)**



BKD KALTIM MONITORING PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN

BALIKPAPAN - Badan Kepegawaian Daerah Kaltim melalui menggelar monitoring penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kab/Kota se Kaltim. Kegiatan monitoring sistem merit ini diadakan untuk berdiskusi bersama guna meningkatkan kualitas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi Kaltim lebih baik kedepannya.

"Ada beberapa yang harus kami benahi tentunya melalui arahan dan bimbingan dari KASN," kata Kepala BKD Provinsi Kaltim Deni Sutrisno dalam sambutannya pada kegiatan monitoring penerapan sistem merit di lingkungan Pemprov/Kab/Kota se Kaltim, di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (23/8/2023). Deni mengatakan bahwa Pemprov Kaltim terus berupaya agar penerapan sistem merit menjadi lebih baik dan meningkat ke depannya

Salah satunya, melalui langkah-langkah perbaikan yang terus diupayakan antara lain strategi maupun upaya peningkatan nilai-nilai agar memiliki bobot tinggi. Lanjutnya, ada 8 aspek yang difokuskan dalam penilaian sistem merit mulai dari perencanaan bahkan sampai dengan sistem informasi

Deni mengungkapkan penerapan sistem merit di Kaltim dengan kategori baik dalam

penilaian terakhir tahun 2022, ada 3 daerah, yaitu Pemprov Kaltim dengan nilai (263,5), Pemkot Bontang (273), dan Balikpapan (266).

"Atas dasar semangat kebersamaan itulah pihaknya mengundang KASN dan teman-teman Kab/Kota kali ini, sharing-sharing bagi pengalaman maupun arahan. Saya ucapkan terima kasih KASN yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan ini," tegasnya.

Dia pun menaruh harapan kedepannya agar sistem pengelola kepegawaian di provinsi Kaltim maupun kab/kota nantinya tetap berkomitmen dan berpihak kepada kualifikasi dan kompetensi (ASN), salah satunya dicontohkan seperti aspek promosi dan mutasi ASN, yang menjadi topik pembahasan pada forum ini

Kegiatan sekaligus dirangkai dengan penyerahan lulusan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXX kepada pemerintah provinsi/kab/kota seKaltim yang diwakilkan pejabatnya masing-masing. Menghadirkan narasumber dari Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sri Hadiati Wara Kustriani dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I KASN, Iwan Agustiawan Fuad. **(adv/diskominfokaltim)**



Proses evakuasi korban kebakaran di RT 28 Kelurahan Sepinggang, Balikpapan Selatan pada Kamis (24/8/2023) pagi.

KEBAKARAN DI SEPINGGAN RENGGUT NYAWA REMAJA & HANGUSKAN 4 RUMAH

BALIKPAPAN - Musibah kebakaran yang terjadi di Kota Balikpapan, tepatnya di RT 28 Kelurahan Manggar, Balikpapan Selatan pada Kamis (24/8/2023), menyisakan kesedihan bagi para korbannya. Bahkan, dalam musibah ini terdapat korban jiwa.

Dari data yang dihimpun dari BPBD Kota Balikpapan, rumah yang terbakar sebanyak 4 rumah daengan satu di antaranya, satu kos berpintu 11.

Selain itu, ditemukan satu korban yang meninggal dunia diketahui seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Diduga, saat kejadian berlangsung korban terjebak di salah satu bangunan rumah yang terbakar.

"Satu orang meninggal, korban ditemukan dengan posisi telungkup," ujar Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, Iptu Hendrik Saragih usai kebakaran.

Jasad korban pun telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Plt Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usma

Ali mengatakan, kobaran api yang menyalanya di permukiman padat penduduk itu berhasil dijinakkan kurang lebih satu jam.

Akses jalan yang sempit diakui membuat petugas kesulitan masuk ke lokasi kebakaran. Sehingga petugas pun harus menyambungkan selang untuk bisa masuk ke lokasi kebakaran.

"Ada 18 unit mobil pemadam yang dikerahkan. Kendalanya tadi jalanannya sempit, karena ini lokasi padat penduduk," jelasnya.

Sementara terkait dengan penyebab munculnya api yang menewaskan satu remaja itu hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. **(bom)**



PEMKAB PASER AJUKAN 2 DOKUMEN TERKAIT KELANJUTAN BANDARA PASER



**PANSUS SEGERA RAMPUNGAN RAPERDA
RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH**



Pertemuan di Kantor Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI

PEMKAB PASER AJUKAN 2 DOKUMEN TERKAIT KELANJUTAN BANDARA PASER

PASER - Hasil penyusunan detail gambar kerja produk perencanaan dan dokumen studi pendahuluan untuk kelanjutan pembangunan bandara, diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser Paser ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Rabu (23/8/2023). Kedua dokumen yang merupakan arahan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub RI itu diserahkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, sebagai tindak lanjut dalam tahapan pembangunan bandara yang selama ini terbengkalai

Kepala Dishub Kabupaten Paser, Inayatullah menjelaskan, pihaknya meminta agar dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang telah disusun pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser.

"Kami meminta agar dokumen yang sudah diajukan untuk dievaluasi," kata Inayatullah, saat

dihubungi, Kamis (24/8/2023). Dari hasil pertemuannya, Inayatullah menjelaskan, Kemenhub RI mengarahkan agar perencanaan yang disusun betul-betul menyesuaikan kondisi eksisting tanah, topografi, drainase, konstruksi runway, taxiway dan landasan parkir.

Selanjutnya juga memperhatikan kondisi bangunan yang telah terbangun baik struktur bawah bangunan, struktur atas bangunan maupun arsitektur bangunan. Hal ini mencakup soal bangunan yang sudah berdiri.

"Memutuskan desainnya masih menyesuaikan desain yang lama atau diperlukan treatment, menggunakan rancangan baru mengingat dokumen tersebut sebagai pedoman teknis pelaksanaan fisik serta untuk penentuan besar anggaran," urai Inayatullah.

Sementara pada dokumen studi pendahuluan, Kemenhub RI juga menginstruksikan agar Pemkab Paser lebih mendetailkan kajian lingkungan strategis terhadap daerah sekitar salah sa-

tunya IKN Nusantara.

"Perlu ditambahkan data dari Bappenas untuk rencana pengembangan daerah-daerah mitra strategis, dan juga penyusunan RDS (Real Demand Survey)," bebernya.

Selain itu, diperlukan pendalaman alternatif pembiayaan melalui sharing anggaran oleh tiga pihak, yakni Kemenhub RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemkab Paser atau melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

Inayatullah memastikan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub RI sangat mendukung dan terus memonitor proses penyusunan kedua dokumen dimaksud. Sebab akan menjadi dasar dalam penganggaran pelaksanaan lanjutan pembangunan bandara.

"Kedua dokumen diharapkan selesai antara September hingga Oktober 2023. Setelah itu baru presentasi akhir di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub RI," tutup Inayatullah. (bs)



Pembahasan Raperda oleh Pansus I DPRD Kabupaten Paser

PANSUS SEGERA RAMPUNGKAN RAPERDA RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH

PASER - Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser segera merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Proses penggodokan Raperda itu, sebelumnya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kepada DPRD Kabupaten Paser melalui Rapat Paripurna, di Gedung Baling Seleloi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, pada Selasa (14/3/2023) lalu.

Hingga kini, dijelaskan Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Paser, Hamransyah, usulan Raperda tersebut masih dalam pembahasan dan penyusunan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari perubahan aturan di atasnya.

"Kami masih membahas dan menyusun Raperdanya. Kita ter-

us lakukan penyesuaian dengan Undang-Undang no. 1 tahun 2022," jelas Hamransyah, Kamis (24/8/2023).

Untuk diketahui, disusunnya Raperda itu, sebagai landasan hukum guna memiliki wewenang untuk mengatur tarif sesuai dengan kondisi yang ada, berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan terbitnya peraturan itu, sehingga Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut. Hamransyah menargetkan, penyelesaian Raperda tersebut selesai pada September 2023.

"Semoga september nanti sudah kita sahkan," harapnya.

Pihaknya berharap, dengan disahkan Raperda tersebut menjadi Perda, dapat meningkatkan

pelayanan masyarakat di bidang pajak dan retribusi daerah dan tentunya akan memberikan tantangan baru bagi Pemkab Paser untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain membahas aturan, DPRD Kabupaten Paser juga mengingatkan, agar potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai tujuan umum, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pemasukan bagi daerah di lintas sektor.

"Dengan tebitnya aturan baru ini kita genjot pendapatan yang selama ini belum bisa kita maksimalkan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pansus I DPRD Kabupaten Paser diketuai Hamransyah, Wakil Ketua Basri, Sekretaris Edwin Santoso dan Anggota yakni Indra Pardian, Dian Yuniarti, Arlina, Rahmadi, Muhammad Saleh, Ahmad Rafi'i. (bs)